

**JURNAL BERITA SOSIAL**

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)/Kessos  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA  
(Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi)**

*Oleh: Nuryadi Kadir*

**ABSTRAK:** Penelitian ini merupakan telaah kajian pemberdayaan masyarakat dalam konteks fenomena perkotaan (urban) yang kompleks akan masalah. Penataan kota yang berimplikasi pada gaya hidup sehat dan bersih, merupakan agenda dalam membangun kesadaran kolektif. Partisipasi dalam tata kelola sampah menjadi kerangka kinerja yang komprehensif bagi setiap perkotaan, utama Kota Makassar. Diskursus masyarakat di Kota Makassar terkait tata kelola sampah merupakan narasi kebijakan publik yang partisipatif. Jargon “Makassar Menuju Kota Dunia” perlu diwujudkan dalam kinerja pembangunan yang sustainable. Refleksi dari jargon utama tersebut terfragmentasi dalam kebijakan persampahan “Makassar Tidak Rantasa (MTR)”. Terminologi “Makassar Tidak Rantasa (MTR)” dianggap sebagai wacana lokal yang berbasis partisipasi. Maka penelitian ini akan menelaah secara deskriptif dengan beberapa pendekatan kajian pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, secara terstruktur tata kelola sampah di Kota Makassar berjalan secara regulatif, prestasi di bidang kebersihan dan sampah seperti penghargaan Adipura 2015 menunjukkan tata kelola sampah tergolong baik. Akan tetapi di secara teknis Program Makassar Tidak Rantasa sebagai tata kelola sampah masih dinilai belum efektif dan efisien, program layanan sampah masih mengalami permasalahan dilapangan, seperti penyediaan tempat sampah, mobilisasi (armada) sampah yang masih menuai permasalahan, yang dimana tidak semua jumlah timbulan sampah terangkut yang terjadi adalah penumpukan beberapa titik di Kota Makassar. Kedua Tata kelola sampah yang berbasis partisipasi belum menyentuh supra kesadaran masyarakat. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat hanya pada tataran teknis dan mekanisme pengangkutan sampah. Pemberdayaan belum menyentuh pada tataran partisipasi dalam menggagas inovasi tata kelola sampah. Model kebijakan belum mendeskripsikan adanya konsultasi public dalam memantapkan tata kelola sampah, utama dalam program zero waste (meniminimalisir volume sampah dari sumbernya). Mendorong kesadaran kolektif masyarakat melalui model-model pemberdayaan terkait sampah belum memiliki kerangka kerja yang bersifat sustainable. Oleh karena itu, terjadi kemandekan pada tataran praksis dalam pengembangan tata kelola sampah kedepan. Inovasi dan inisiasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelembagaan) belum disambut baik dan mendapat respon positif oleh pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk keberlanjutan tata kelola sampah. karena kerangka pengelolaan sampah masih dipahami sebagai dimensi kinerja konvensional yang bersifat rutin dan sirkulatif.

*Kata Kunci: Partisipasi, tata Kelola Sampah dan Pemberdayaan*

**IMPLEMENTATION OF MAKASSAR PROGRAM IS NOT IMPRESSIVE  
(Participatory Waste Management Study)**

*By: Nuryadi Kadir*

**ABSTRACT:** This study merupakan review of the study of community empowerment in the context of urban phenomenon (urban) complex problems. Arrangement of cities that implicate the healthy lifestyle and clean, is an agenda in building collective awareness. Participation in waste management becomes a comprehensive performance framework for every urban, major city of Makassar. The community discourse in Makassar City related to waste management is a participatory public policy narrative. The Jargon "Makassar Towards the City of the World" needs to be manifested in a

suistana development performance. Reflections from the main jargon are fragmented in the waste policy of "Makassar Not Rantasa (MTR)". Terminology "Makassar Not Rantasa (MTR)" is considered as a locally based discourse of participation. So this research will study descriptively with some approach of study of community empowerment. Based on the result of the research, Firstly, structurally, waste management in Kota Makassar runs regulatively, achievement in cleanliness and garbage like Adipura 2015 shows good waste management. However, technically, the Makassar Program No Rantasa as a waste management is still considered to be ineffective and efficient, the garbage service program is still experiencing problems in the field, such as the provision of garbage bins, garbage fleet which still reap the problem, which is not all the amount of waste generation transported that happens is the accumulation of several points in the city of Makassar. Both participation-based waste management has not touched the public's awareness. Community empowerment and involvement is only at the technical level and the mechanism of transporting waste. Empowerment has not touched on the level of participation in initiating innovation of waste management. The policy model has not yet described the existence of public consultation in solidifying waste management, major in the zero waste program (minimizing waste volume from source). Encouraging community collective awareness through waste-related empowerment models does not yet have a suistana framework. Therefore, there is an impasse on the level of praxis in the development of future waste management. Innovation and initiation of community-based waste management (institutional) has not been welcomed and received a positive response by the government of Makassar as a form of sustainability of waste management. because the waste management framework is still understood as a conventional and circulative conventional performance dimension

*Keywords: Participation, Waste Management and Empowerment*

## **A. LATAR BELAKANG**

*"Makassar Menuju Kota Dunia"* menjadi *jargon* utama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Berbagai inovasi pembangunan yang dilakukan agar predikat menuju kota dunia tidak hanya sebatas wacana semata. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar rata-rata 8-9 % (2014), menunjukkan iklim prekonomian tergolong positif, menjadi salah satu destinasi pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Tidak dipungkiri pesatnya perkembangan Kota Makassar karena

pertumbuhan ekonomi, bahkan berada diatas angka pertumbuhan nasional. Akan tetapi kemajuan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kemajuan disegala bidang, justru menimbulkan berbagai persoalan. Perspektif pembangunan ekonomi dengan logika pertumbuhan tekadang menyimpang sejuta persoalan perkotaan yang berdampak pada permasalahan sosial di perkotaan. Kesenjangan ekonomi, ketidakteraturan, kesembrawutan, kesan kumuh bermasalah pada kebersihan menjadi salah satu dari sejuta persoalan kota. Predikat sebagai kota dunia sesungguhnya sangat dilematis, karena harus menanggung padatnya penduduk dengan populasi mencapai

1.5 juta jiwa (BPS Makassar 2016) dengan segala aktivitasnya yang berkonsekuensi pada permasalahan penataan dan kebersihan kota.

Rendahnya bentuk kesadaran warga, ditambah tata kelola sampah yang masih bersifat partikular, tidak komprehensif memberikan kesan gagalnya menyikapi sampah perkotaan. Sejauh ini, Pemkot Makassar melaksanakan pengelolaan sampah, akan tetapi kenyataan implementasinya bersifat parsial. Berdasarkan hal tersebut diidentifikasi permasalahannya seperti *pertama* sistem pengelolaan dari hulu ke hilir atau dari sumber sampah menuju akhir tidak berjalan maksimal, contohnya, kapasitas daya tampung TPA (Tempat Pembuangan Akhir) melebihi target, tanpa didukung dengan model reduksi dan pengolahan daur ulang, *kedua* tidak meratanya pendistribusian TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti gendang dua (sudah tidak terpakai), bak sampah dan *ketiga* jadwal dan armada kendaraan pengangkut sampah yang disebut “*Tangkasaki*”, tidak sesuai atau sebanding dengan jumlah produksi sampah dan tidak konsistennya dalam mengangkut sampah. *Keempat* kecenderungan pola dan gaya hidup warga Kota Makassar yang konsumtif dan tidak diimbangi dengan kesadaran hidup bersih semakin meningkatkan potensi sampah di Kota Makassar.

Pengamatan selama ini, Masih ada sekitar 21 % sampah (BPS 2015) tidak

terangkut dalam setiap harinya di Kota Makassar. Produksi sampah yang dihasilkan di Kota Makassar sekitar 4.057, 28 meter kubik/hari, (BPS 2016) atau 600 ton/hari, bahkan diprediksi terjadi peningkatan sekitar 200 ton/perhari. Selanjutnya menurut data BPS tahun 2014, produksi sampah dari wilayah pemukiman sebanyak 1.847,47 meter kubik/hari atau sekitar 45 % dari jumlah keseluruhan sampah yang ada di kota Makassar.

Pada rezim pemerintahan Walikota Danny Poemanto memberikan angin segar terkait pengelolaan sampah. Melalui program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Pemkot dengan segala strateginya untuk mendorong pola kesadaran dan partisipasi langsung warga Kota Makassar. Selanjutnya, Dalam sub program MTR, Pemkot Makassar mencanangkan salah satu programnya yaitu Bank Sampah “*Sampah Ditukar Dengan Beras*” untuk mendorong partisipasi masyarakat. Skema Program Bank Sampah dilaksanakan tidak lain dikarenakan sumber penyumbang sampah terbesar di kota Makassar berasal dari kawasan pemukiman, sehingga perlu meminimalisir sampah dari sumbernya. Maka upaya pemerintah untuk mendorong penyikapan sampah yang berbasis partisipatoris.

Akan tetapi upaya Pemkot Makassar masih belum memberikan respon yang positif

dari masyarakat. Pada aspek sosialisasi program sampah yang belum menjangkau pada seluruh warga kota, kampanye dalam membentuk kesadaran warga seperti LISA (Lihat Sampah Ambil) hanya sebagai jargon atau tagline semata, tidak terinternalisasi dalam perilaku sadar sampah. Selanjutnya pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan pada jam-jam yang padat sehingga pengangkutan mengalami kendala. Khususnya pula menindaklanjuti program Bank Sampah, Pemkot Makassar melalui UPTD Daur Ulang Sampah dan Sampah Tukar Beras menargetkan penambahan 200 Bank Sampah tersebar di Kota Makassar di tahun 2015 tidak terdistribusi dengan baik. Sistem operasi bank sampah yang dilakukan oleh UPTD Daur Ulang Sampah, menggunakan sistem timbangan sebagai alat penghitungan jumlah, jenis, volume pun menuai persoalan dilapangan. Sayangnya perencanaan belum didukung oleh perangkat, kebijakan dan infrastruktur.

Pola pengelolaan sampah pada dasarnya sudah harus *dicluster* berdasarkan kelompok sasaran dan sebagai bentuk pengelolaan sampah yang *suistenable*. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan menjelaskan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya,

merupakan hal yang harus diperhatikan dan digalakkan. Penanganan sampah harus menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak (*stakeholder*). Pelaksanaan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta dari masyarakat dan pihak swasta (Kodoatie, 2003).

Perhatian seluruh pihak masih ditemukan permasalahan, hanya sebagian warga yang sadar akan model pengelolaan sampah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Skenario kebijakan sampah selama ini kurang mengarah pada tanggung warga dalam mengurus sampah. Kesadaran yang dibangun hanya pada wilayah teknis, tidak mendorong kesadaran secara esensial. Apalagi telah disampaikan sebelumnya, bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya. Jika diamati jenis sampah dalam suatu rumah tangga tergolong daur ulang dan mudah dimanfaatkan, ada dua jenis sampah pada umumnya, antara lain sampah yang sulit terurai seperti plastik, karet, gelas dan logam dan sampah organik seperti sisa makanan.

Jenis dan bentuk sampah umumnya dapat diolah menjadi daur ulang. Sampah diperkotaan pun pada dasarnya mampu dikluster berdasarkan tempatnya. Maka dari itu partisipasi warga tidak hanya

menginformasikan akan tetapi mengedukasi dengan memberikan stimulasi dan inovasi untuk ikut berkontribusi dalam gaun pemberdayaan terhadap pengelolaan sampah.

Perlu pengkajian secara khusus dan mendalam dalam melibatkan partisipasi warga Kota Makassar. Pelibatan warga selama ini hanya pada wilayah teknis pelaksanaan. Terdapat sampah sejenis yang telah disebutkan berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah, memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Identifikasi permasalahan penelitian ini, mencoba mendeskripsikan tata kelola sampah yang didukung dengan regulasi, pola yang pengelolaan sampah secara internal dalam meningkatkan partisipasi warga. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah : Bagaimana Tata Kelola Sampah berbasis partisipasi di Kota Makassar . Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara umum tentang tata kelola sampah yang secara partisipatif.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Sampah dan Jenis Sampah**

Sampah merupakan benda padat yang tidak terpakai lagi, tidak diinginkan keberadaanya yang berasal dari aktivitas manusia (Suprpto 2007). Sampah akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan tentang sampah di

perkotaan semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan semakin terbatasnya lokasi atau lahan pembuangan sampah.

Selanjutnya WHO mendefinisikan sampah, adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 18 tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sampah merupakan suatu benda yang tidak digunakan dan berasal dari manusia.

Sedangkan tipe sampah dapat dibedakan atas beberapa bagian, (1) sampah organik mudah busuk (*garbage*), (2) sampah organik tidak mudah busuk (*rubbish*), (3) sampah abu (*ashes*), (4) sampah bangkai binatang (*dead animal*), (5) sampah sapuan jalan (*street sweeping*), (6) sampah industri (*industrial waste*), (Pandebesie, 2005).

### **2. Tinjauan Sumber Sampah dalam suatu Perkotaan**

Sampah yang dihasilkan perkotaan secara umum bersumber dari beberapa kawasan antara lain kawasan pemukiman, kawasan industri, daerah aliran sungai dan pinggiran laut. Departemen Pekerjaan Umum

RI (1994) mengkategorikan sumber sampah sebagai berikut :

- a) Wilayah Permukiman
- b) Wilayah Komersial
- c) Wilayah Institusi
- d) Wilayah Industri
- e) Sampah jalan dan tempat-tempat terbuka
- f) Tempat Pembangunan, pemugaran dan pembongkaran
- g) Rumah sakit dan balai pengobatan
- h) Sampah hasil pertanian.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik pun mengkategorisasikan sumber sampah berdasarkan kawasan sebagai berikut :

- a) Pemukiman meliputi mewah, menengah dan sederhana
- b) Fasilitas Kota meliputi pasar, kawasan perniagaan, perkantoran, pendidikan, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit dan sarana ibadah.
- c) Kawasan Industri
- d) Perairan Terbuka
- e) Pantai Wisata
- f) Sungai dan Anak sungai
- g) Sapuan Jalan dan Taman.

### **3. Tinjauan Industri dan Bentuk Sampah yang diciptakan**

Industri pada dasarnya terdapat aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Seperti yang di paparkan oleh I Made Sandi

(1985) bahwa industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Adapun klasifikasi industri, sebagai berikut :

- a) Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahanmentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian.
- b) Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan.
- c) Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan.

Sampah industri adalah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat (Alex, 2012). Sampah industri berasal dari seluruh rangkaian proses kegiatan produksi yang dilakukan oleh suatu industri yang berisi bahan-bahan kimia dan serpihan/potongan bahan yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Termasuk perlakuan dan pengemasan produk yang dihasilkan oleh industri (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah yang dihasilkan oleh industri sering berupa atau dalam bentuk

bahan kimia yang seringkali beracun dan berbahaya memerlukan perlakuan dan penanganan khusus sebelum dibuang. Umum membutuhkan instrumen untuk mencegah resiko berbahaya.

#### **4. Tinjauan Pemberdayaan dalam Mendorong Partisipasi**

Sesuai dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, isu pengembangan masyarakat menjadi tren dalam pembangunan saat ini. Gambarnya yaitu, membuka peluang dan akses kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kemandirian masyarakat. Awalnya *Community Development* yang di singkat *Comdev* merupakan pendekatan yang dianut oleh negara-negara kesejahteraan dan pendekatan tersebut muncul disaat krisis yang dialami negara kesejahteraan dalam keberlanjutannya. Pada dasarnya *Comdev* adalah tindak lanjut dari konsep kesejahteraan yang berbasis masyarakat, konsep yang berhubungan dengan gagasan pembangunan sosial yang dimana pembangunan yang menyikapi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Faktanya dilapangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi jaminan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan masyarakat dapat keluar dari permasalahannya.

Sesuai dengan karakternya *Comdev* membicarakan penguatan yang berbasis

masyarakat dengan melihat potensi lokal yang didesain untuk menciptakan kemandirian. Pendekatan *Comdev* dijalankan dan diterjemahkan dalam bentuk pemberdayaan (*Empowerment*) yang mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan atau membangun tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapi. Permasalahan sosial selalu tidak lepas dalam kehidupan masyarakat, kondisi masyarakat kadang dalam keadaan tidak beruntung (*disadvantaged*), sehingga dibutuhkan pemecahan masalah tanpa mengurangi partisipasi masyarakat dengan melihat pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang dimiliki.

Pendekatan tersebut hadir mendorong masyarakat keluar dari permasalahan yang dialaminya, oleh karena itu dibutuhkan pelaku itu sendiri untuk berperan aktif. Hal tersebut didasari oleh individu dan masyarakat memiliki potensi, ada keinginan untuk berubah, terdapat norma-norma sosial dan budaya yang menguatkan komitmen dan orientasi untuk mengembang diri. Oleh karena itu *comdev* tersebut hadir sebagai program pendampingan masyarakat untuk memotivasi dan membantu menentukan arah hidup yang berkualitas.

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan deskriptif. Ruang

lingkup dan Lokasi penelitian di Kota Makassar dengan fokus kepada pemangku kebijakan (pemerintah terkait), pihak swasta dan masyarakat di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi literatur, wawancara mendalam dengan 5 informan yang terkait, *Focus Group Discussion* dan dokumentasi. Adapun analisa meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1 Deskripsi Kota Makassar dan Permasalahan Sampah**

Pada pembahasan sub bab ini, akan di deskripsikan profil Kota Makassar. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu di sebut Ujung Pandang. Kota Makassar terletak antara 119<sup>0</sup> 24'17'38" bujur Timur dan 5<sup>0</sup>8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi. Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan "angin mammiri" ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan

posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Sebelum membahas lebih jauh dan komprehensif terkait partisipasi, perlu memahami kondisi persampahan kota Makassar. Setiap periode kepemimpinan Kota Makassar, masalah sampah di kota tersebut belum mampu diurai secara komprehensif. Program sampah yang dicetuskan oleh pemerintah disetiap periode kepemimpinan masih belum mampu menyelesaikan persoalan sampah bahkan setiap tahunnya produksi sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Program MTR dicanangkan saat ini belum tuntas, tetapi sebagai langkah dan upaya yang dilakukan cukup memberikan benefit dalam pengelolaan sampah. Berikut ini tabel jumlah timbulan sampah di Kota Makassar.

Tabel 4.1

Jumlah Timbulan Sampah 2014-2015

No	Tahun	Jumlah Timbulan (M3/Hari)
1	2013	3.923,32 M3/hari
2	2014	4.057,28 M3/hari
3	2015	4.057,28 M3/hari

Sumber: Diolah berdasar MakassarAngka 2016

Berdasarkan tabel 5.2 Timbulan sampah mengalami peningkatan dari 2013



## JURNAL BERITA SOSIAL

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)/Kessos  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

dengan jumlah 3.923,32 m<sup>3</sup>/hari menjadi 4.057,28 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2014, terjadi kenaikan jumlah timbunan sebesar 133,96 m<sup>3</sup>/hari dan 2015 sejumlah 4.057,28 M<sup>3</sup>/hari. Jika diamati rata-rata jumlah timbunan tersebut merupakan sampah. Jumlah sampah menunjukkan bahwa rata-rata komposisi sampah di Kota Makassar adalah organik (72,72%), kertas(9,47%), plastik (9,89%),kayu (0,71 %), logam (3,34 %), karet (2,82%), gelas (0,99%). Berdasarkan data tersebut, maka sebagian besar sampah di Makassar adalah sampah mudah terurai, yakni organik. Secara fakta timbunan sampah padat tidak dapat dihentikan, justru mengalami peningkatan volume sampah ini terbukti Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang berlokasi di daerah Antang sudah melebihi kapasitas. Sumbangan sampah di Kota Makassar sejumlah. Pengelolaan ini seharusnya dikurangi atau diminimalisasi secara baik. Pembiayaan dalam pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah. Karena pada umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampai di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya Komposisi sampah di Kota Makassar Tabel 4.2

Komposisi Sampah di Kota Makassar

No	Komposisi	Volume (M3)	%
----	-----------	-------------	---

1	Sampah Organik	2.999,79	76,98%
2	Kertas Koran	322,16	8,52%
3	Plastik	366,02	9,68%
4	Metal, Kaleng, Besi, Aluminium	81,67	2,16%
5	Karet, Ban	55,21	1,46%
6	Kaca	29,87	0,79%
7	Kayu	11,72	0,31%
8	Lain-lain	3,78	0,10%
	<b>Rata-Rata</b>	<b>3.781,23</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan, 2014

Jumlah dan komposisi sampah yang terdapat di Kota Makassar tergolong tinggi. Kepadatan penduduk merupakan faktor determinan hasil sampah meningkat. Jika ditelaah tabel komposisi sampah, ternyata sampah organik menempati posisi pertama dalam produksi sampah yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Tinggi tingkat produksi sampah organik masyarakat belum dikelola secara utuh yang sesuai dengan regulasi tata kelola sampah sehubungan dengan *zero waste*. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya pemerintahan yang senantiasa mengkampanyekan pengurangan sampah dari sumber dengan berbagai inovasi. Pada dasarnya terjadi ketimpangan tata kelola sampah yang terjadi di Kota Makassar yang mana beberapa perwujudan program sampah seperti bank sampah (sampah ditukar dengan beras) hanya diperuntukan atau diprioritaskan pada sampah daur ulang yang berjenis plastik

dan karet yang notabene produksi sampah sejenisnya tergolong rendah.

## **2. Pengelolaan Sampah berbasis Partisipasi.**

Pada sub pembahasan ini. Akan dipaparkan pengelolaan sampah di Kota Makassar dengan melihat beberapa aspek dan uraikan berdasarkan hasil penelitian. Pengelolaan dideskripsikan dan dianalisis melalui pengamatan bentuk pelaksanaan program sampah Kota Makassar. Selanjutnya menelaah secara mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

### **a. Implementasi Program Sampah Pemerintah Kota Makassar**

Regulasi secara umum terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di setiap wilayah membutuhkan penanganan secara maksimal. Tidak dipungkiri setiap kota-kota besar, permasalahan sampah merupakan PR (pekerjaan rumah) yang tak kunjung selesai. Jika di tinjau dari segi regulasi perangkat undang-undang, anggaran, implementasi program dan sumber daya yang mendukung, masih selalu menemui permasalahan. Inovasi terkait persampahan yang dilakukan setiap elemen baik pemerintah sendiri, lembaga pendidikan dan penelitian belum bisa dikatakan efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Makassar pun mengalami hal demikian. Terkait inovasi

program sampah ditetapkan melalui jargon yang berkearifan lokal seperti “Makassar Tidak Rantasa” belum menumbuhkan kesadaran masyarakat. Jargon regulasi terkait tata kelola sampah yang bertema dan berkarakter bahasa Daerah Makassar, bentuk identitas lokalitas Kota Makassar memiliki pesan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Secara kognitif dan dipahami dalam perspektif sebagian masyarakat Kota Makassar merupakan langkah membangun kesadaran kolektif masyarakat. Konsepsi tata kelola yang dimaksudkan memiliki agenda agar senantiasa warga Kota Makassar menyadari secara betul-betul permasalahan sampah menjadi gerakan sosial melalui kebijakan. Penyertaan jargon-jargon dalam tata kelola sampah tersebut yang berharap adanya partisipasi aktif masyarakat.

Sayangnya, partisipasi yang dilakukan melalui regulasi tersebut berkesan formalitas, karena pemenuhan prasyarat dasar dalam tata kelola sampah masih menimbulkan permasalahan seperti komitmen pemerintah yang secara konsisten dan berkelanjutan dalam mengelolah sampah belum terwujud dengan baik. Kebijakan yang bersifat populis belum bisa melembagakan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Selain itu, penyediaan layanan-layanan sampah yang dibangun mulai dari sektor penyediaan tempat sampah (gendang dua) yang

ditempatkan setiap jalan secara permanen, justru merusak keindahan dan rapinya pengepakan sampah. Berdasarkan pengamatan, terkadang sampah berserakan disekitar tempat sampah disebabkan wadah plastik sampah robek. Penggunaan plastik sampah sebagai wadah langsung (tanpa ada wadah kotak sampah) menimbulkan sampah berserakan.

Tempat sampah gendang dua tersebut hanya bertahan beberapa bulan dan rusak tanpa ada proses *maintenance*. Dilain sisi anggaran beli plastik sampah sempat menjadi isu polemik yang mengejutkan masyarakat Kota Makassar karena anggaran pembiayaan pembelian plastik sampah tergolong tinggi. Kurangnya transparansi dan kurangnya akuntabilitas tata kelola sampah justru menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap implementasi pengelolaan sampah yang berdampak pada partisipasi. Keluhan masyarakat seakan menjadi bom waktu bagi koreksi tata kelola sampah di Kota Makassar.

Selanjutnya mobilisasi sampah (kendaraan sampah yang biasa diistilah "*Mobil Tangkasaki*") dari pemukiman ke TPS secara regulatif belum efektif mengangkut sampah. Masyarakat yang bermukim di lorong-lorong, perumahan yang tidak bersentuhan langsung dengan jalan protokol tidak dijangkau oleh kendaraan sampah, yang terjadi adalah penumpukan sampah setiap rumah masyarakat. Pengambilan sampah yang menggunakan

motor sampah pula tidak bisa memuat seluruh volume sampah yang ada. Penumpukan sampah tidak terangkut di beberapa wilayah menjadi koreksi dalam komitmen pemerintah dalam melaksanakan tata kelola sampah. Studi proyeksi dan prediksi volume sampah dan daya muat belum disesuaikan oleh pemerintah. Keterbatasan armada angkut merupakan permasalahan yang krusial yang dihadapi oleh Kota Makassar. Kontribusi sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* dalam menambah armada masih dirasakan belum cukup mengangkut sampah.

Penegakan dalam supremasi hukum terkait sampah belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan kawasan bebas sampah beserta perangkat hukumnya. Beberapa lokasi telah dijamin Pemerintah Kota Makassar sebagai kawasan bebas sampah seperti di *public area* seperti Pantai Losari, Karebosi yang merupakan tempat yang padat aktivitas masyarakat di waktu senggang justru menjadi kawasan sampah. Peneguran dan pemberian sanksi kepada pelaku pembuang sampah tidak ditindak oleh karena itu menumbuhkan kesadaran melalui partisipasi dan mekanisme sanksi serta jargon-jargon belum bisa membangun kesadaran masyarakat secara kolektif terkait sampah.

Permasalahan yang diuraikan sebelum, tidak mengurangi semangat pemerintah Kota

Makassar dalam berinovasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan yang dari usaha mengurangi sampah diwujudkan melalui beberapa mekanisme seperti melalui regulasi utamanya. Upaya yang senantiasa memperbaiki tata kelola sampah memberikan hasil yang cukup dengan mendapatkan penghargaan Adipura 2015 untuk meningkatkan performa kinerja tata kelola.

#### **b. Kontribusi Sektor Swasta (Penanganan Sampah Industri)**

Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun maka kebutuhan akan produk pun ikut bertambah, aktivitas industri pun berkembang akibat pengaruh geliat ekonomi yang berdampak pada penambahan volume sampah. Tumbuhnya industri di Kota Makassar sebagai destinasi ekonomi dengan berbagai instrumen dan fasilitas seperti kawasan industri, industri jasa (hotel, rumah makan/restoran) dan pusat ekonomi (pertokoan) yang menghasilkan sampah cukup signifikan. Sampah industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sampah yang sejenis rumah tangga yang bersumber dari kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan perkantoran, perniagaan. Kondisi kota Makassar kini diperhadapkan dengan sampah industri yang belum dijangkau pada aspek regulasi dan manajemen. Selama ini tata kelola sampah bersifat konvensional yaitu

kumpul-angkut-buang, belum ada proses pemilahan dan pemrosesan sampah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Penerapan kegiatan 3R di masyarakat masih terkendala terutama oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, kasus demikian terjadi pada kegiatan industri/perusahaan. Utami (2008), mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga tanpa adanya upaya mengurangi volume sampah menimbulkan pemborosan sumber daya karena untuk proses pengangkutan dan pembuangannya membutuhkan biaya yang besar. Lebih lanjut Bhat dalam Utami (2008) menyebutkan bahwa biaya pengangkutan dan pembuangan sampah mencapai 70-80% dari total biaya pengelolaan sampah kota yang dibebankan oleh Pemerintah Kota tanpa mengikut sertakan pihak swasta (industri/perusahaan).

Jika merujuk regulasi persampahan yang berbasis partisipasi, seyogyanya pihak swasta menjadi bagian dari tatakelola sampah.

Tata kelola sampah industri kebanyakan diserahkan oleh pihak swasta itu sendiri melalui manajemen masing-masing yang tidak jelas pengawasannya. Sampah industri berpotensi untuk menciptakan pendapatan ekonomi daerah, ketika adanya kerjasama dari pihak pemerintah dan swasta. Peran serta dan kerjasama melalui mekanisme program *Corporate Social Responsibility* dengan memberikan bantuan armada sampah.

Tata kelola yang mengharapkan kontribusi swasta sebatas program *Corporate Social Responsibility* dinilai tidak cukup, karena pihak swasta atau perusahaan juga memproduksi sampah. Memang disadari pengelolaan sampah industri yang dihasilkan merupakan tanggung jawab pemantauan pemerintah pusat seperti kementerian kesehatan dan lingkungan terkait sampah bersifat limbah. Pemerintah Kota Makassar melalui forum *Corporate Social Responsibility* lebih mendorong partisipasi langsung pihak swasta dalam tata kelola sampah.

### **c. Partisipasi Masyarakat (Perencanaan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat)**

Reformasi dapat disebut sebagai momentum pembentukan tatanan pemerintahan baru dalam skema *good governance* dan perwujudan dari proses demokratisasi di negeri ini. Pembangunan yang berkarakter partisipasi membuka peluang masyarakat untuk ikut tandil dan terlibat

langsung dalam suatu keputusan pembangunan. Pandangan terhadap masyarakat hanya sebagai objek pembangunan mengalami transformasi sebagai subjek pembangunan. Sehingga daerah selalu mendorong adanya pembangunan yang partisipatif.

Tata kelola sampah sebagai salah satu focus pembangunan dengan menyerahkan melalui skema partisipasi. Namun partisipasi yang terjadi belum dalam taraf secara ideal. Lamanya model tatanan pemerintah dengan gaya rezim pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan mengakibatkan kurang partisipatif masyarakat. Kurangnya tingkat kepercayaan dan rasa pesimis dalam pembangunan sehingga mendorong lahirnya skema partisipasi melalui program pemberdayaan.

Jargon tata kelola sampah pemerintah Kota Makassar berusaha menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme kerja-kerja pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Partisipasi yang dilakukan melalui mekanisme struktur pemerintahan, pemerintahan kelurahan beserta RT dan RW berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye “Makassar Tidak Rantasa”. Peran kelembagaan non-pemerintah belum dilibatkan secara massif. Wacana dan praksis terkait pengelolaan sampah belum berbasis pada *community power* sehingga partisipasi tidak

menyentuh sampai lapisan kesadaran masyarakat.

Tata kelola sampah melalui proses pembangunan partisipasi bersifat pada level teknis, seperti mengumpulkan sampah di rumah dan membawa, mengantar pada tempat sampah yang disediakan pemerintah (gendang dua) yang dilakukan secara rutin. Penetapan jadwal pengambilan sampah yang diatur oleh pemerintah menjadi stimulasi yang dilakukan dalam mendorong partisipasi. Wacana dan praksis dalam aktivitas pengelolaan sampah sebatas demikian. Tidak menyentuh secara substansif pelibatan dan menggagas ide-ide sampah berbasis masyarakat, membuka konsultasi publik terkait sampah belum menjadi model pemberdayaan yang dilakukan dalam tata kelola sampah di Kota Makassar. Wacana *zero waste* dari sumber belum tidak distimulasi skema utama dalam pengelolaan sampah sehingga basis partisipasi masyarakat hanya pada tataran teknis pengangkutan sampah. Mendorong melalui supra kesadaran masyarakat terkait sampah belum disentuh sebagai skema dasar dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, kemandekan wilayah praksis sebagai semangat kolektif masyarakat belum menjadi agenda yang sustainable.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka disimpulkan :

- 1) Tata kelola sampah di Kota Makassar secara regulatif berjalan dengan baik. Prestasi di bidang kebersihan dan sampah seperti penghargaan Adipura 2015 menunjukkan tata kelola sampah berjalan dengan baik.
- 2) Program Makassar Tidak Rantasa sebagai jargon tata kelola sampah masih dinilai belum efektif dan efisien karena secara teknis program penyediaan layanan masih mengalami permasalahan dilapangan, seperti penyediaan tempat sampah, mobilisasi (armada) sampah yang masih menuai permasalahan, yang dimana tidak semua jumlah timbulan sampah terangkut yang terjadi adalah penumpukan beberapa titik di Kota Makassar.
- 3) Tata kelola sampah yang berbasis partisipasi belum menyentuh supra kesadaran masyarakat. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat hanya pada tataran teknis dan mekanisme pengangkutan sampah. Pemberdayaan belum menyentuh pada tataran partisipasi menggagas, melakukan konsultasi public kepada masyarakat,

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alex S. (2012). *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta
- Damanhuri. (2010). *Diktat Kuliah : Pengelolaan Sampah*. Program Studi Teknik Lingkungan ITB, Bandung
- Environmental Resources Management. (2007). *Laporan uji tuntas sosial*

# JURNAL BERITA SOSIAL

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)/Kessos  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

- proyek LFG TPA Bank Dunia.  
Makassar
- Irwen. (2005). *Kajian kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Istianto, Bambang.(2011). *Privatisasi dalam model Public Private Partnership*, Mitra wacana media, Jakarta.
- John W.Creswell.2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kodoatie J. Robert. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Meleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosda Karya. Bandung
- Lukman Hakim, Undang. (2009). *Perpektif Ergologi (Ergonomi dan Ekologi) Dalam Manajemen Pengelolaan Sampah*. ISTA . Jakarta
- Linder Stphen H. (1999). *Coming to Terms with The Public Private Parthership AmericanScientiecs*, University of Texas, Houston, Sage Publication Inc, Journal volume 43.
- Pandebesie, E.S, (2005). *Buku Ajar Teknik Pengelolaan Sampah*. Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS. Surabaya
- Wijaya, Rahmadia ( 2010 ) *pengelolaan Sampah Kota solusi masalah lingkungan dan masalah nasional*. Universitas Mulawarman. Samarinda
- Saputra, Dian. (2002). *Studi potensi kerjasama pemerintah dan swasta di dalam pengelolaan sampah di kota batam*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Sandi, I Made (1985)
- Sutedi, Adrian.(2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Suprpto. (2005). *Dampak Masalah Sampah Terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Kesehatan Vol.1 (2) (2005). Jakarta.
- Suharto, Edi. (2008). *Corporate Sosial Responsibility : What is and Benefit for Corporate dalam majalah Bisnis & CSR*, Volume 1, No.4, Maret 2008 \
- \_\_\_\_\_(2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_(2005). *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*.PT Rafika Aditama. Bandung.
- Tchobanoglous, G. Theisen, H. dan Vigil, S. (1993). *Integrated Solid Waste Management:Engineering Principles and Management Issues*. Mc.Graw-Hill, Inc.Singapore.
- Utama, Dwinanta. (2010). *Prinsip dan Strategi Penerapan “public private partnership” dalam penyediaan infrastruktur transportasi*. Jurnal Sains dan Teknologi indonesia vol. 12.
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Prakterk*. Prenadamedia Jakarta
- PDF, Makalah, Literatur dan UU.
- Undang-Undang Republik Iindonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- Kebijakan Departemen Pekerjaan Umum RI 1994
- ProfilKabupaten / Kota Makassar Sulawesi Selatan
- Makassar Dalam Angka Tahun 2013
- Badan Pusat Statistik R.I
- Internet**
- <http://www.makassar.tribunnews.com%2F2014%2F02%2F28%2Fvolume-sampah-di-makassar-bertambah-menjadi-800-ton> di Akses Pada Tanggal 12 Mei 2014 pukul 15.30 WITA.
- <http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/15595-sampah-terbanyak-di-hotel-dan-restoran.html> di Akses Pada Tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.30 WITA.
- <http://www.ilmusipil.com/sumber-sumber-sampah> di Akses Pada Tanggal 17 Mei 2014 pukul 16.30 WITA.